

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata, Winarna Surya. 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi) 1*. Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. 2013.
- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan Anarullah, dkk, UI-Press, Jakarta.
- Effendi, David dan Sri Wuryanti. 2011. *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otoda di kabupaten Nganjuk*. Seminar Nasional ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi Unimus 2011.
- Halim, Abdul. 2005. *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Haryanto, Sahrudin dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hirawan, Susiyati Bambang. 1990. *The Role of Revenue Sharing in Intergovernmental Financial Relations : The Indonesian Case*. Faculty of Commerce an Social Science. University of Birmingham
- Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. 2010. *Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andhi.

- Mudrajad Kuncoro. 2000. *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah dan Kebijakan)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Munir, Dasril., Djuanda, Henry Arys., Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. YPAPI, Yogyakarta.
- Nataluddin. 2001. *Potensi Dana Perimbangan Pada Pemerintahan Daerah di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN.

- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Safi'i. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah (Perspektif Teoritik)*. Malang: Averroes Press.
- Sijabat, Mentari Yosephen, Choirul Saleh dan Abdul Wachid. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2, No. 2:236-242.
- Sonny Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sukanto Reksohadiprojo. 2001. *Ekonomika Publik (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: BPF.
- Susantih, Heny dan Yulia Saftiana. 2010. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi se Sumatera Bagian Selatan*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XII Ikatan Akuntan Indonesia.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yuliati. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPPYKPN.